

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

¹Mohamad Sam'un; ²Ismanudin; ³Ibrohim

¹Prodi Agribisnis Universitas Singaperbangsa, Karawang

Email: moh.samun@faperta.unsika.ac.id

^{2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: ismanudin@unwir.ac.id; ibrahimsaleh@gmail.com

ABSTRAK

Potensi sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan merupakan sektor pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dieksploitasi secara maksimal dan ditetapkan menjadi sektor unggulan daerah (*leading sectors*) di Kabupaten Indramayu. Sektor tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Indramayu merupakan kabupaten bahari di Propinsi Jawa Barat dengan potensi panjang pantai tidak kurang dari 114 km. Namun demikian efektivitas program pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, Analisis data dilakukan dengan Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan PAD dari sektor retribusi pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu masih kurang optimal, diantaranya karena rasio jumlah ikan yang dilelangkan di TPI relatif masih sedikit, target retribusi masih rendah, penggalian potensi sumber-sumber retribusi belum maksimal, kontribusi perahu kecil sangat rendah, sedangkan jumlahnya sangat banyak dan alat tangkap yang digunakan kurang produktif.

Kata kunci: efektivitas program, retribusi TPI, PAD, sektor perikanan dan kelautan.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu adalah PAD yang berasal dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu. Retribusi TPI diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Sebagai landasan operasionalnya diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 60 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu.

PAD Kabupaten Indramayu dari sektor perikanan dan kelautan pada tahun 2009 baru mencapai Rp. 3.612.714.995,-, sedangkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perikanan dan kelautan menyerap dana sebesar Rp. 12.703.515.500,-. Tampak bahwa terjadi ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitan awal diketahui bahwa pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan berupa retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu selama ini

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan intensifikasi penyelenggaraan pelelangan ikan masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Disiplin kerja unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan, wajib retribusi pelelangan ikan dan petugas pengelola retribusi pelelangan ikan belum berjalan dengan semestinya. Efektivitas program pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan belum optimal. Untuk itu fokus penelitian ini diarahkan pada efektivitas program pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu.

LANDASAN TEORI

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001) bahwa “konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.” Pendekatan tujuan adalah untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pendekatan teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (*input*) dan keluaran (*output*) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain, bahwa organisasi mengambil sumber (*input*) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses suatu sumber daya dan mengembalikannya dalam bentuk lain yang sudah diubah (*output*).

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001) memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem dengan menggunakan aspek kajian antara lain : (1) Produksi; Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi sesuatu dalam jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan lingkungan; (2) Efisiensi; Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output terhadap input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan input; (3) Kepuasan; Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna; (4) Keadaptasian; Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern; (5) Pengembangan; Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk dapat berkembang; (6) Keberlangsungan atau Hidup Terus; Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001) adalah : (1) Efektivitas Individu; Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi; (2) Efektivitas kelompok; Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya; dan (3) Efektivitas Organisasi; Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2010.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Potensi Sumber Daya Alam Bidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Indramayu.

Potensi sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan merupakan sektor pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dieksploitasi secara maksimal dan ditetapkan menjadi sektor unggulan daerah (*leading sectors*) di Kabupaten Indramayu. Sektor tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Indramayu merupakan kabupaten bahari di Propinsi Jawa Barat dengan potensi panjang pantai tidak kurang dari 114 km. Garis pantai Indramayu mencakup 12 kecamatan pantai, yaitu Kecamatan Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Pasekan, Arahan, Cantigi, Losarang, Kandanghaur, Patrol dan Sukra.

Kegiatan perikanan dan kelautan di Indramayu mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan serta pengelolaan produksi garam rakyat. Kegiatan perikanan tangkap meliputi aktifitas penangkapan ikan di laut dan di perairan umum. Kegiatan perikanan budidaya meliputi pembenihan ikan dan udang, pembesaran ikan di kolam air tawar, pembesaran ikan dan rumput laut di tambak air payau dan pembudidayaan ikan di laut. Kegiatan pengolahan hasil perikanan dan kelautan meliputi pengolahan ikan segar, pengolahan produk ikan asin, terasi, otak-otak, bakso ikan, nuget, empek-empek, kerupuk ikan dan udang, pindang ikan dan kuliner masakan berbahan dasar ikan dan udang. Kegiatan pengelolaan produksi garam rakyat merupakan aktifitas dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.

Produksi perikanan dan kelautan tahun 2010 tercatat sebanyak 249.071,11 ton atau naik 59,72% bila dibandingkan dengan produksi tahun 2009 yang mencapai 155.945,14 ton. Produksi perikanan dan kelautan tahun 2010 dimaksud dihasilkan dari produksi perikanan tangkap di laut sebesar 108.554,60 ton, produksi perikanan tangkap di perairan umum 5.544,10 ton, produksi budidaya di tambak air payau 82.149,79 ton, produksi ikan di kolam air tawar 51.852,35 ton dan budidaya di laut sebesar 970,27 ton. Sedangkan produksi pengolahan hasil perikanan dan kelautan sebesar 15.921,00 ton dan produksi garam rakyat sebesar 311.922 ton.

Kegiatan perikanan tangkap di Indramayu terdiri dari kegiatan penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan serangkaian kegiatan mencari dan mengambil ikan di perairan laut dengan batas mulai dari garis pantai sampai ke perairan laut. Aktifitas penangkapan ikan di laut dilakukan dengan menggunakan kapal atau perahu penangkap ikan yang dilengkapi dengan jenis alat tangkap tertentu. Kapal atau perahu penangkap ikan menggunakan mesin penggerak. Ukuran mesin penggerak bervariasi mulai dari ukuran kecil hingga besar disesuaikan dengan besar kecilnya ukuran kapal. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu penangkapan ikan dilakukan mulai dari tepi pantai sampai ke laut lepas. Sedangkan kapal atau perahu yang tidak dilengkapi dengan mesin penggerak sudah tidak ada. Alat tangkap ikan yang digunakan meliputi jenis jaring insang, jaring kantong, jaring payang, jaring purse seine, jaring udang, jaring cumi, jaring rajungan, bubu, sero dan pancing. Dengan menggunakan alat tangkap ini hasil yang diperoleh meliputi ikan, udang, cumi, rajungan, kepiting, teripang dan kerang.

Berikut ini disajikan rekapitulasi data armada perahu nelayan di Kabupaten Indramayu.

Tabel 1: Jumlah Armada Perahu Nelayan menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Indramayu

No	Lokasi		Jumlah Armada (Unit)				Jumlah
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	
1	Kandanghaur	1.1 Eretan Wetan	668	40	-	-	708
		1.2 Eretan Kulon	397	21	-	-	418

No	Lokasi		Jumlah Armada (Unit)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
2		1.3 Ilir	138	-	-	-	138
		1.4 Parean Girang	131	-	-	-	131
		1.5 Bulak	87	-	-	-	87
		1.6 Kertawinagun	83	-	-	-	83
	Sub Jumlah		1,504	61	-	-	1,565
	Indramayu	4.1 Pabean Udik	453	2	2	-	457
		4.2 Karangsong	236	21	64	3	324
		4.3 Singaraja	143	-	-	-	143
		4.4 Paoman	63	120	64	2	249
		4.5 Singajaya	117	-	-	-	117
4.6 Tambak		8				8	
4.7 Margadadi		14	19	11	-	44	
Sub Jumlah		1,034	162	141	5	1,342	
3	Juntinyuat	3.1 Dadap	501	207	66	-	774
		3.2 Limbangan	187	-	-	-	187
		3.3 Lombang	88	-	-	-	88
		3.4 Juntinkedokan	54	-	-	-	54
		3.10 Juntinyuat	46	-	-	-	46
	Sub Jumlah		876	207	66	-	1,149
4	Cantigi	4.1 Cangkring	172	-	-	-	172
		4.2 Cantigi Kulon	221	-	-	-	221
		4.3 Panyingkiran Lor	23	-	-	-	23
		4.4 Lamarantarung	29	-	-	-	29
	Sub Jumlah		445	-	-	-	445
5	Pasekan	5.1 Brondong	201	-	-	-	201
		5.2 Totoran	2	-	-	-	2
		5.3 Pabean Ilir	70	-	-	-	70

No	Lokasi		Jumlah Armada (Unit)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
		5.4 Pasekan	24	-	-	-	24
		5.5 Pagirikan	31	-	-	-	31
		5.6 Karanganyar	9	-	-	-	9
	Sub Jumlah		337	-	-	-	337
6	Losarang	6.1 Cemara	262	-	-	-	262
		6.2 Santing	11	-	-	-	11
		6.3 Pangkalan	21	-	-	-	21
		6.4 Krimun	8	-	-	-	8
		6.5 Jumbleng	4	-	-	-	4
	Sub Jumlah		306	-	-	-	306
7	Balongan	7.1 Majakerta	197	-	-	-	197
		7.2 Balongan	14				14
	Sub Jumlah		211	-	-	-	211
8	Sindang	8.1 Penganjang	102	-	-	-	102
		8.2 Wanantara	-	-	-	-	-
		8.3 Babadan	76	-	-	-	76
		8.4 Panyindangan Kulon	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah		178	-	-	-	178
9	Patrol	9.1 Sukahaji	120				120
		9.2 Bugel	45				45
	Sub Jumlah		165	-	-	-	165
10	Sukra	10.1 Ujunggebang	157	-	-	-	157
		Sub Jumlah		157	-	-	-
11	Karangampel	11.1 Benda	153	-	-	-	153
		Sub Jumlah		153	-	-	-
12	Lohbener	12.1 Rambatan Kulon	37	-	-	-	37

No	Lokasi		Jumlah Armada (Unit)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
13	Sub Jumlah		37	-	-	-	37
	Arahan	13.1 Kec. Arahan	17	-	-	-	17
	Sub Jumlah		17	-	-	-	17
Jumlah Total			5,420	430	207	5	6,062

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu Tahun 2010

Nelayan dan juragan di Kabupaten Indramayu berasal dari Kecamatan Kandanghaur, Juntinyuat, Indramayu, Cantigi, Pasekan, Losarang, Balongan, Sindang, Patrol, Sukra, Karangampel, Lohbener dan Arahan. Sebagian besar nelayan dan armada (kapal nelayan) perikanan tangkap di Indramayu terkonsentrasi di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Juntinyuat. Pada tiga kecamatan tersebut memiliki potensi TPI besar yang menjadi andalan perikanan tangkap Indramayu. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong Kecamatan Indramayu merupakan PPI yang menghasilkan produksi pelelangan ikan terbesar di Jawa Barat.

Tabel 2 : Jumlah Nelayan menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Indramayu

No	Lokasi		Jumlah Nelayan Orang)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
1	Kandanghaur	1.1 Eretan Wetan	2,713	2,282	-	-	4,995
		1.2 Eretan Kulon	1,711	441	-	-	2,152
		1.3 Ilir	693	-	-	-	693
		1.4 Parean Girang	749	-	-	-	749
		1.5 Bulak	349	-	-	-	349
		1.6 Kertawinagun	332	-	-	-	332
	Sub Jumlah		6,547	2,723	-	-	9,270
2	Indramayu	4.1 Pabean Udik	1,205	22	26	-	1,253
		4.2 Karangsong	1,442	244	632	45	2,363
		4.3 Singaraja	258	-	-	-	258
		4.4 Paoman	1,113	1,398	832	30	3,373
		4.5 Singajaya	68	-	-	-	68
		4.6 Tambak	143	-	-	-	143

No	Lokasi		Jumlah Nelayan Orang)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
		4.7 Margadadi	212	214	143	-	569
	Sub Jumlah		4,441	1,878	1,633	75	8,027
3	Juntinyuat	3.1 Dadap	2,885	4,152	2,441	-	9,478
		3.2 Limbangan	718	-	-	-	718
		3.3 Lombang	438	-	-	-	438
		3.4 Juntinkedokan	640	-	-	-	640
		3.10 Juntinyuat	522	-	-	-	522
		Sub Jumlah		5,203	4,152	2,441	-
4	Cantigi	4.1 Cangkring	881	-	-	-	881
		4.2 Cantigi Kulon	1,046	-	-	-	1,046
		4.3 Panyingkiran Lor	92	-	-	-	92
		4.4 Lamarantarung	114	-	-	-	114
		Sub Jumlah		2,133	-	-	-
5	Pasekan	5.1 Brondong	528	-	-	-	528
		5.2 Totoran	150	-	-	-	150
		5.3 Pabean Ilir	184	-	-	-	184
		5.4 Pasekan	203	-	-	-	203
		5.5 Pagirikan	63	-	-	-	63
		5.6 Karanganyar	98	-	-	-	98
		Sub Jumlah		1,226	-	-	-
6	Losarang	6.1 Cemara	1,155	-	-	-	1,155
		6.2 Santing	30	-	-	-	30
		6.3 Pangkalan	21	-	-	-	21
		6.4 Krimun	55	-	-	-	55
		6.5 Jumbleng	4	-	-	-	4
		Sub Jumlah		1,265	-	-	-
7	Balongan	7.1 Majakerta	762	-	-	-	762

No	Lokasi		Jumlah Nelayan Orang)				
	Kecamatan	Desa	< 10 GT	11-30 GT	31-50 GT	> 50 GT	Jumlah
8		7.2 Balongan	66				66
	Sub Jumlah		828	-	-	-	828
	Sindang	8.1 Penganjang	618	-	-	-	618
		8.2 Wanantara	34	-	-	-	34
		8.3 Babadan	486	-	-	-	486
8.4 Panyindangan Kulon		100	-	-	-	100	
Sub Jumlah		1,238	-	-	-	1,238	
9	Patrol	9.1 Sukahaji	444				444
		9.2 Bugel	212				212
	Sub Jumlah		656	-	-	-	656
10	Sukra	10.1 Ujunggebang	668	-	-	-	668
		Sub Jumlah		668	-	-	-
11	Karangampel	11.1 Benda	822	-	-	-	822
		Sub Jumlah		822	-	-	-
12	Lohbener	12.1 Rambatan Kulon	143	-	-	-	143
		Sub Jumlah		143	-	-	-
13	Arahan	13.1 Kec. Arahan	51	-	-	-	51
		Sub Jumlah		51	-	-	-
Jumlah Total			25,221	8,753	4,074	75	38,123

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu Tahun 2010

Produksi perikanan tangkap yang dilelangkan di TPI umumnya didominasi oleh perahu nelayan berukuran besar yaitu > 30 GT dengan alat tangkap Gill Net. Sedangkan perahu nelayan berukuran kecil yaitu < 10 GT dengan jumlah yang sangat banyak yaitu 5.420 buah perahu nelayan mengalami kontra produktif semenjak perairan pantai Indramayu tercemar oleh tumpahan minyak mentah dengan jumlah yang cukup besar, yaitu sejak bulan September 2008. Hingga kini penghasilan perahu nelayan di bawah 5 GT selalu mengalami kerugian. Berbagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut telah dan sedang serta terus diupayakan agar nelayan kecil dapat berdaya dan berkemampuan, seperti pembuatan rumpon, peningkatan alat tangkap dan peningkatan armada perahu. Namun usaha tersebut sangat terbatas, baik pembiayaan dari pemerintah maupun swasta, sehingga banyak nelayan kecil yang hampir dan telah gulung tikar.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kekayaan Laut pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu diketahui bahwa: Nelayan kecil sudah mulai gelisah karena penghasilannya terus menurun. Ketersediaan sumberdaya ikan di pantai sudah *over fishing*. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, jika tidak akibatnya menambah pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu terus digalakkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan nelayan kecil. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut antara lain : (a) Habitat ikan di tepi laut/pantai telah rusak sehingga kehidupan ikan sangat berkurang bahkan relatif langka, dimana daerah ini merupakan daerah beroperasinya perahu nelayan kecil, sedangkan jumlah nelayan kecil sangat banyak. Oleh karena itu solusi yang perlu diterapkan adalah upaya menyediakan tempat / habitat yang cocok yaitu dengan pembuatan rumpon atau terumbu karang buatan; (b) Untuk meningkatkan produksi hasil tangkapannya, perahu nelayan kecil dengan jangkauan areal penangkapan relatif rendah dan sempit yaitu hanya di sekitar tepi pantai, perlu disokong dengan peningkatan armada perahu nelayan berikut mesin penggeraknya dan peningkatan volume jaring yang digunakan. Dengan upaya peningkatan seperti ini maka perahu nelayan kecil akan mampu dan berdaya guna untuk melakukan penangkapan ikan di areal / daerah penangkapan ikan yang lebih luas jangkauannya. Dan telah banyak bukti bahwa semakin luas daya jangkauan perahu untuk menangkap ikan, maka akan meningkat pula produksi hasil tangkapannya. Hal ini akan menghasilkan peningkatan penghasilan nelayan kecil, sehingga perlahan-lahan kemiskinan akan teratasi.

Aktifitas penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan Indramayu tersebar pada koordinat antara 106° – 117° BT dan 106° LS - 3° LU. Lokasi koordinat penangkapan ikan itu mencakup pantai utara Ujung Kulon hingga mendekati perairan Selat Makassar, sedangkan ke arah utara nelayan Indramayu melakukan aktifitas penangkapan ikan hingga perbatasan Laut China Selatan. Daerah penangkapan ikan dalam peristilahan dikenal sebagai *Fishing Ground*. *Fishing Ground* yang terdekat dengan Indramayu dan merupakan *Fishing Ground* utama adalah perairan sekitar Pulau Biawak, Pulau Candikian dan Pulau Gosong. Ketiga pulau tersebut berjarak sekitar 25 km dari garis pantai Indramayu. Pulau-pulau tersebut adalah gugusan pulau-pulau karang. Gugusan karang beserta tumbuhan merupakan daerah subur sehingga merupakan habitat yang baik untuk hidupnya jenis-jenis ikan tertentu. Jenis ikan yang umum ditangkap di daerah tersebut meliputi ikan kerapu, kuro, baronang, kakap merah, ikan sawoan, kuniran, kurisi, talang-talang, tenggiri, ikan kue, ikan pari, udang, rajungan dan jenis ikan hias karang. Perairan di sekitar ketiga pulau tersebut merupakan daerah penangkapan ikan bagi kapal atau perahu nelayan ukuran kecil yaitu di bawah 10 GT. Alat tangkap yang digunakan adalah berupa jaring insang (*Gill Net*).

Beberapa *Fishing Ground* lain yang dekat dengan pantai Indramayu adalah perairan pantai Karangampel sekitar anjungan pengeboran minyak pantai, perairan yang dipasang rumpon (rumah ikan), perairan antara Subang dan Karawang (yaitu anjungan minyak di laut dan Pulau Batu). Perairan sekitar anjungan pengeboran minyak di pantai Karangampel dan pantai Subang merupakan perairan yang banyak ditemukan barang-barang tenggelam di dasar laut. Barang muatan tenggelam itu ditumbuhi lumut dan tumbuhan air sehingga tempat tersebut amat cocok sebagai habitat ikan.

Perairan laut yang dipasang rumpon (rumah ikan) merupakan salah satu *Fishing Ground* penting di laut. Rumah ikan dibuat dan dirancang secara khusus dari bahan-bahan berupa cor beton, ban-ban bekas, keranjang botol bekas yang didesain dan dirakit secara khusus. Benda-benda tersebut ditenggelamkan di dasar laut dengan diberi pemberat yang sesuai. Pemasangan rumah ikan dilakukan di perairan dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Penentuan letak pemasangan digunakan alat penentu titik koordinat yaitu GPS (*Global Position System*) sehingga akan memudahkan mencari titik lokasi rumah ikan untuk aktifitas penangkapan berikutnya. Alat tangkap yang umum digunakan untuk menangkap ikan di sekitar rumah ikan adalah pancing dan jaring. Jenis ikan yang biasa tertangkap di lokasi sekitar rumah ikan, tidak jauh berbeda dengan jenis ikan yang tertangkap di gugusan kepulauan karang.

Beberapa *Fishing Ground* lain bagi nelayan Indramayu adalah meliputi perairan sekitar Pulau Bangka Belitung, pantai sebelah barat, selatan dan timur Pulau Kalimantan, perairan sekitar Pulau Natuna hingga perbatasan Laut China Selatan, perairan Kepulauan Karimun Jawa dan perairan sekitar Pulau Massalembu. Daerah penangkapan tersebut merupakan daerah penangkapan kapal nelayan yang berukuran lebih dari 20 GT dengan mesin penggerak lebih dari 6 silinder. Mesin penggerak yang digunakan adalah mesin bekas mobil seperti Fuso dan Mitsubishi. Kapal ikan tersebut dilengkapi dengan jaring yang cukup banyak / panjang. Panjang jaring yang digunakan bisa mencapai 12 km lebih. Jaring yang digunakan adalah jaring insang multifilamen berbahan baku senar. Kapal juga dilengkapi dengan alat bantu navigasi seperti kompas, peta laut, GPS dan *Fish Finder*. Peralatan lain yang sangat dibutuhkan adalah genset, mesin penghancur es dan *freezer* untuk membekukan ikan segar.

Ikan hasil tangkapan di laut harus dipasarkan dengan cara dilelangkan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di seluruh Indramayu. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelelangan Ikan. Sebagai landasan operasionalnya diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 60 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pemungutan dan Penggunaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu. Dalam perda dan perbup tersebut diatur tentang besaran nilai retribusi pelelangan ikan dan mekanisme tata cara pemungutan dan penyetorannya. Berkaitan dengan besaran nilai uang, teknis pemungutan dan penyetorannya diperlukan tenaga personil yang mempunyai sikap profesional dan jujur.

Data produksi perikanan dan kelautan yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini adalah yang menyangkut produksi perikanan tangkap di laut yang dilelangkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Produksi perikanan tangkap di laut belum semuanya dilelangkan di TPI, masih banyak ikan hasil tangkapan di laut yang tidak dilelangkan di TPI. Produksi ikan hasil tangkapan di laut yang dilelangkan di TPI-TPI di Kabupaten Indramayu pada tahun 2010 sebanyak 34.587.480,65 kg dengan nilai Rp. 241.872.505.310,- menghasilkan retribusi pelelangan ikan sebesar Rp. 5.442.164.286,48. Berikut ini penulis sajikan Tabel 4.6 yang memuat rekapitulasi data ikan yang dilelangkan di TPI-TPI se-Kabupaten Indramayu selama tahun 2010.

Tabel 3: Jumlah Produksi (Kg) dan Nilai Jual (Rp) Ikan yang Dilelangkan di TPI se-Kabupaten Indramayu Tahun 2010.

NO.	Nama Penyelenggara	Target 2010	Realisasi	%
		Kg dan Rp.	Kg dan Rp.	
1	<i>Kud Mina Jaya</i>	378,272.00	450,088.00	118.99
	Tegalagung	3,500,000,000.00	4,941,155,000.00	141.18
2	<i>Kud Ngupaya Mina</i>	528,981.00	67,218.00	12.71
	Dadap	3,591,783,000.00	553,469,300.00	15.41
3	<i>Kud Sri Mina Sari</i>	1,090,668.00	1,301,894.00	119.37
	Glayem	5,200,000,000.00	5,471,840,500.00	105.23
4	<i>KPL Mina Mulya</i>	227,000.00	4,465.00	1.97

NO.	Nama Penyelenggara	Target 2010	Realisasi	%
		Kg dan Rp.	Kg dan Rp.	
	Lombang	215,650,000.00	6,697,500.00	3.11
5	<i>KUD Mina Sejati</i>	87,045.00	15,473.00	17.78
	Limbangan	450,000,000.00	108,725,000.00	24.16
6	<i>KUD Baita Mina Lestari</i>	53,729.00	61,786.00	115.00
	Majakerta	384,162,000.00	549,881,000.00	143.14
7	<i>KPL Fajar Amil Laban</i>	1,357,919.00	-	-
	Singaraja	801,172,000.00	-	-
8	<i>KPL Mina Sumitra</i>	15,796,417.00	16,525,820.00	104.62
	Karangsong	161,671,760,000.00	180,943,935,000.00	111.92
9	<i>KPUD Mina Sejahtera</i>	75,472.00	-	-
	Brondong	400,000,000.00	-	-
10	<i>KUD Karya Mina Muda</i>	8,491.00	488.00	5.75
	Cangkring	45,000,000.00	1,463,000.00	3.25
11	<i>KUD Misaya Mina</i>	2,871,506.00	2,254,376.00	78.51
	Eretan Wetan	21,105,570,000.00	17,966,799,000.00	85.13
12	<i>KUD Mina Bahari</i>	12,595,886.00	13,884,757.00	110.23
	Eretan Kulon	25,191,772,000.00	31,237,184,000.00	124.00
13	<i>KUD Mina Sentosa</i>	39,367.00	17,228.65	43.76
	Bugel	442,881,000.00	163,308,540.00	36.87
14	<i>KUD Karya Mina</i>	18,375.00	3,887.00	21.15
	Ujunggebang	110,250,000.00	57,474,000.00	52.13
<i>JUMLAH</i>		35,129,128.00	34,587,480.65	98.46
		223,110,000,000.00	241.872.505.310,00	108.47

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu Tahun 2010

2. Efektivitas Pengelolaan PAD Sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Indramayu.

Pembahasan efektivitas pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten dengan mendasarkan kriteria efektivitas organisasi menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) meliputi (1) Produksi. (2) Efisiensi (3) Kepuasan, (4) Keadaptasian, (5) Pengembangan, dan (6) Keberlangsungan. Uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi aspek kajian efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Produksi

Uraian aspek kajian pertama menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi sesuatu dalam jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan lingkungan. Untuk memperoleh *output* dilakukan suatu proses menurut standar yang telah direncanakan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, mahasiswa yang lulus, pasien yang dipulangkan, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi bersangkutan.

Penelitian berkaitan dengan aspek kajian ini, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Indikator kinerja dari aspek kajian produksi meliputi produksi ikan yang dilelangkan di TPI, jumlah retribusi pelelangan ikan yang disetor dan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menjelaskan bahwa : (1) Target retribusi pelelangan ikan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 4.250.000,00. (2) Rencana kerja dinas dalam upaya mendukung pencapaian target adalah melaksanakan program kegiatan yang relevan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. (3) Metode kerja yang dilakukan adalah dengan pembinaan, pelayanan dan pengaturan. (4) Output yang diharapkan adalah tercapainya target retribusi dan pelaksanaan program kerja sesuai rencana.

Data dokumentasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa dari target produksi yang ditetapkan sebesar 35.129.128 kg tercapai 34.587.480,65 kg (98,46%). Dari target raman yang ditetapkan sebesar Rp. 223.110.000.000,00 tercapai Rp. 241.872.505.310,00 (108,47%). Daftar produksi dan nilai jual (raman) ikan yang dilelangkan di TPI dapat dilihat pada Tabel 4.6. Persentase tingkat pencapaian nilai jual (raman) lebih tinggi dari persentase tingkat pencapaian produksi ini disebabkan oleh adanya upaya perbaikan penanganan pasca panen dengan penerapan sistem rantai dingin di atas kapal lebih baik sehingga ikan yang dijual mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Jumlah realisasi retribusi pelelangan ikan pada tahun 2010 yang disetor ke kas daerah adalah sebesar Rp. 5.442.164.286,48 (128,05%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.250.000.000,00.

Perolehan pungutan retribusi pelelangan ikan sampai dengan tahun 2009 belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Baru pada tahun 2010 ini perolehan retribusi pelelangan ikan Dinas Perikanan dan Kelautan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tim binwas merasa puas dengan perolehan tersebut. Padahal kalau dikaji lebih mendalam realisasi jumlah ikan yang dilelang di TPI baru mencapai 18,17% dari keseluruhan ikan yang ditangkap di laut oleh nelayan Indramayu. Hal ini berdasarkan data laporan tahun 2010 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dan laporan dari KPL/KUD Mina. Dari laporan tersebut diperoleh bahwa jumlah raman ikan yang dilelangkan di TPI (*raman by landing*) pada tahun 2010 seluruhnya Rp. 241.872.505.310,00 (produksi 34.587,48 ton). Dan berdasarkan sumber data laporan hasil kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2010 diperoleh data statistik hasil perikanan tangkap di laut adalah sebesar Rp. 1.332.083.650.000,00 (produksi 108.554,60 ton). Apabila data raman *by landing* diperbandingkan dengan raman statistik diperoleh bahwa raman *by landing* hanya 18,17% dari nilai raman statistik. Artinya masih sekitar 81,83% ikan hasil tangkapan laut yang tidak dilelangkan di TPI-TPI se-Kabupaten Indramayu.

Data dokumenter dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu menentukan beberapa jenis kegiatan dan strategi dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan guna mendukung pencapaian target produksi dan retribusi pelelangan ikan melalui :

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Kegiatan dan strategi program ini meliputi : pembangunan dan penataan PPI, pengerukan muara PPI, pembangunan jetty dan pengarah arus, pembangunan tempat sandar perahu, pembangunan kolam labuh dan kolam putar, pembangunan SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan), pembangunan *docking* dan bengkel kapal, pembangunan kios bahan dan alat penangkapan, revitalisasi alat tangkap ikan dan restrukturisasi armada penangkapan ikan.

Program ini dilakukan untuk menyediakan fasilitas pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan yang representatif. Tujuannya adalah agar nelayan tertarik dan merasa nyaman apabila mendaratkan dan melelangkan ikan di TPI yang ada di Indramayu. Manfaat yang diperoleh adalah bahwa pendapatan masyarakat pesisir Indramayu dan retribusi pelelangan ikan dapat meningkat.

- b. Program Penataan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Kegiatan dan strategi program ini meliputi : pembangunan rumah ikan, restocking ikan dan udang di laut, pembangunan dan rehabilitasi kawasan mangrove, pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati perikanan dan kelautan, pengawasan dan perlindungan sumber daya lingkungan, penataan kawasan konservasi laut daerah. Program ini dilakukan untuk menunjang ketersediaan ikan yang siap tangkap di laut lestari sepanjang waktu. Sehingga nelayan dapat melakukan penangkapan ikan di perairan laut Indramayu sepanjang waktu. Manfaat yang diperoleh adalah bahwa hasil tangkapan nelayan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir Indramayu.
- c. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Kegiatan dan strategi program ini meliputi : penyediaan IDPI (Informasi Daerah Penangkapan Ikan), penyediaan informasi kondisi dan cuaca laut, pembangunan talud *break water* penahan abrasi pantai. Program ini dilakukan untuk menyediakan informasi daerah penangkapan yang akurat kepada nelayan dan juragan. Sehingga aktifitas penangkapan ikan di laut mempunyai tingkat kepastian yang lebih tinggi terutama mengenai posisi *fishing ground*. Disamping itu informasi mengenai kondisi dan cuaca di laut dapat membantu tingkat keselamatan nelayan dalam melaut. Tujuannya adalah agar tingkat efisiensi dan efektivitas nelayan dalam menangkap ikan lebih tinggi. Manfaat yang diperoleh adalah bahwa dapat meningkatkan ikan hasil tangkapan di laut sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
- d. Pemanfaatan Kekayaan Laut
Kegiatan dan strategi program ini meliputi : estimasi stok ikan di laut dan pemetaan pola migrasi ikan di laut. Program ini dilakukan untuk menyediakan informasi ketersediaan stok ikan dan pola pergerakan ikan di laut. Tujuannya adalah agar masyarakat nelayan mempunyai informasi mengenai hal tersebut di atas. Manfaat yang diperoleh adalah bahwa nelayan dapat memprediksi kapan dan di mana harus melakukan penangkapan ikan.

b. Efisiensi

Uraian aspek kajian kedua menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara *output* terhadap *input*. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan *output*. Ukuran-ukuran efisiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, tingkat penghunian (hotel), biaya per pasien, per mahasiswa, per rekanan. Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang dipergunakan.

Penelitian berkaitan dengan aspek kajian ini, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Indikator kinerja dari aspek kajian efisiensi meliputi anggaran pembangunan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas penunjang yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, apakah pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan efisien atau tidak.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa "Anggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap adalah sebesar Rp 5.485.784.214,00 pada tahun 2010 dan Rp. 17.517.806.500,00 pada tahun 2011." Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan meliputi : nelayan dan juragan 38.123 orang, bakul 1.125 orang, pengurus dan karyawan KUD Mina/KPL 267 orang dan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan 14 orang serta DPPKAD 2 orang. Menurut jumlahnya sumberdaya manusia yang mendukung pengelolaan PAD sektor

perikanan dan Kelautan sudah cukup. Namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini mengingat masih ada yang memiliki semangat kerja dan disiplin yang kurang baik. Rata-rata pendidikan mereka adalah SLP dan SLA. Pelatihan-pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada sangat diperlukan agar mempunyai kemampuan, semangat dan disiplin kerja yang memadai. Fasilitas yang digunakan untuk mengelola PAD sektor Perikanan dan Kelautan berupa sarana prasarana di TPI, sarana transportasi kendaraan motor dan mobil, sarana administratif ketatausahaan berupa komputer dan ATK.

Output yang dihasilkan meliputi bangunan prasarana PPI dan TPI, komponen sarana penangkapan ikan, dan sejumlah dana retribusi pelelangan ikan. Untuk menilai aspek kajian efisiensi, dimana input yang berupa anggaran, SDM dan fasilitas dibandingkan terhadap output yang berupa produksi ikan tangkapan, retribusi pelelangan ikan dan bangunan fisik sarana prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap, maka akan sulit diukur karena ada faktor-faktor lain yang bersifat sosial dan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai *multiflier effect* dari pembangunan perikanan dan kelautan.

c. Kepuasan

Uraian aspek kajian ketiga menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para pegawai/karyawan dan pengguna atau pelanggan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan pegawai/ karyawannya. Dalam hal ini kita menggunakan istilah kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini. Ukuran kepuasan mencakup sikap pegawai/karyawan, pergantian pegawai/karyawan, keabsenan, kelambanan, dan keluhan.

Aspek kajian kepuasan erat kaitannya dengan materi dan kondisi lingkungan kerjanya. Apabila imbalan yang diperolehnya dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya, maka merupakan salah satu aspek yang mendorong kepuasan kerja. Lingkungan dia berkerja juga amat mempengaruhi tingkat kepuasannya. Lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif membuat orang menjadi nyaman. Apabila pegawai/karyawan merasa puas dengan kondisi pekerjaannya baik yang berkaitan dengan gaji/upah maupun lingkungan kerjanya, maka dia akan menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Dia akan produktif, cekatan dalam bekerja, kreatif dan tidak mengeluh atas pekerjaan yang dilakukannya. Peran seseorang dalam organisasi juga mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. Artinya seorang pegawai/karyawan yang diberi peran sesuai kemampuan dan keahliannya akan merasa puas ketimbang apabila diberi peran yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tingkat kehadirannya pun tinggi, tidak malas, dan mendorong mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi atas tugas dan pekerjaannya. Akibatnya akan menjaga disiplin kerjanya.

Penulis meneliti aspek kajian kepuasan ini pada KPL Mina Sumitra. Ada salah satu karyawan yang mempunyai sikap ideal dan dia mempunyai tekad kuat untuk memperbaiki keadaan yang dianggapnya salah. Dia berusaha menyelidiki kemudian menyampaikannya kepada atasannya atas kesalahan yang dibuat karyawan lain. Namun karena terlalu semangat akhirnya banyak rekan-rekannya yang merasa tidak suka, bahkan pihak pengurus koperasi pun demikian. Dalam hal ini terjadi pro dan kontra di antara sekelompok karyawan koperasi tersebut. Pihak yang merasa kontra berusaha membuat situasi kerja sedemikian rupa sehingga karyawan tersebut merasa tidak nyaman. Kondisi kerja dibuat sedemikian rupa agar tidak kondusif dan tidak nyaman. Akibatnya karyawan tadi yang mempunyai idealisme tinggi mulai tertekan dan lambat laun semangatnya melemah. Tingkat kepuasannya menjadi rendah, walaupun dia mendapat upah yang besar. Gairah kerjanya mulai berkurang. Bahkan akibatnya dia mendapat teguran.

Penulis mempelajari kondisi kejadian di atas bahwa faktor lingkungan kerja dapat mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. Walaupun upah yang diterima seseorang cukup besar, namun apabila kondisi lingkungan kerjanya tidak nyaman bahkan tekanan terhadap dirinya cukup besar, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, maka tingkat kepuasan

seseorang akan menurun. Akibatnya gairah kerja menurun dan timbul sikap malas, sehingga tidak produktif dan tidak bisa bekerja secara efektif.

d. Keadaptasian

Uraian aspek kajian keempat menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan *ekstern* dan *intern*. Keadaptasian dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh organisasi sendiri dalam upaya untuk menyesuaikan dengan perkemabangan yang terjadi. Ketidakefektifan dalam produksi, ketidakefisienan, dan ketidakpuasan merupakan pertanda perlunya adaptasi praktek dan kebijaksanaan manajerial. Ukuran yang dapat digunakan adalah peningkatan sarana dan kapasitas kemampuan SDM seperti pelatihan dan penyuluhan untuk menyesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan.

Penelitian terhadap aspek kajian adaptasi ini, penulis lakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Penulis mewawancarai Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan. Beliau mengatakan bahwa : Sampai dengan tahun 2009, dasar hukum penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusinya adalah Perda Propinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2005, karena pada saat itu pengelolaan retribusi pelelangan ikan dilakukan oleh propinsi. Namun mulai tahun 2010 pengelolaan retribusi pelelangan ikan sepenuhnya diserahkan kepada kabupaten/kota, sehingga mulai tahun 2010 perda propinsi yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu pada tahun 2009 Dinas Perikanan dan Kelautan mempersiapkan diri membuat perangkat aturan hukumnya bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu untuk membuat perda tentang penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusinya. Sebagai konsekuensinya harus dilakukan strategi penyesuaian (adaptasi) dan sosialisasi di tingkat lapangan.

Dalam wawancara berikutnya dijelaskan lagi bahwa : Pada akhir tahun 2009, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyampaikan gagasan secara terbuka berkaitan dengan kebijakan pungutan retribusi pelelangan ikan. Menteri menyebutnya sebagai “kado tahun baru 2010 bagi nelayan”. Kebijakan lisan yang dia sampaikan adalah sehubungan dengan keinginannya untuk memperingan beban nelayan, maka retribusi pelelangan ikan akan dihapus, dan besaran nilai retribusi sebagai PAD bagi kabupaten/kota yang hilang akan diganti dengan dana APBN. Namun sayangnya hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengatur penghapusan retribusi pelelangan ikan. Akibatnya pada saat itu yaitu awal tahun 2010, dimana Kabupaten Indramayu sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Perda Kabupaten No. 2 dan 5 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Retibusi Tempat Pelelangan Ikan mengalami suatu keadaan yang kontra produktif. Kami sangat menghargai kebijakan lisan Pak Menteri, tetapi kami masih berusaha menjalankan amanat perda tersebut selama belum ada peraturan di atasnya yang menyatakan pencabutan/penghapusan retribusi pelelangan ikan.

Di sini Dinas Perikanan dan Kelautan dituntut untuk menyusun dan menerapkan strategi adaptasi yang baik. Pertama, berkaitan dengan adaptasi perubahan aturan atau dasar hukum yang semula diatur dengan perda propinsi kemudian dasar hukumnya berubah menjadi perda kabupaten. Dalam proses pembuatan perda kabupaten harus banyak yang dilakukan, mulai dari penyusunan draft materi perda, komunikasi dan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda dan DPRD Kabupaten, studi banding isi perda dan implementasinya, dan penyiapan anggarannya. Kedua, dalam kaitan strategi adaptasi juga perlu dilakukannya sosialisasi isi perda kepada wajib retribusi dan lembaga/instansi terkait agar isi materi dapat dipahami pihak sasaran. Ketiga, memberi pemahaman agar dapat bersikap yang bijak dan benar secara proporsional mengenai isi kebijakan lisan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu “kado tahun baru 2010 bagi nelayan, berupa rencana penghapusan retribusi pelelangan ikan” sehingga tidak menjadi kontra produktif. Keempat, strategi adaptasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelelangan ikan, dimana pada masa sebelumnya dilakukan oleh petugas dari DPPKAD Propinsi Jawa Barat kemudian menjadi tugas dan kewajiban aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Strategi adaptasi tersebut dilakukan dalam rangka menunjang efektivitas pengelolaan PAD

sektor perikanan dan kelautan. Dalam hal ini strategi sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan dan bakul masih harus ditingkatkan lagi agar tingkat efektivitas pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan dapat meningkat.

Sehubungan dengan adanya peralihan pengelolaan retribusi pelelangan ikan dari propinsi ke kabupaten/kota, penulis melakukan kajian dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Bagi Hasil Pendapatan Propinsi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Indramayu. Dari kajian tersebut diperoleh informasi bahwa masih terdapat dana bagi hasil retribusi pelelangan ikan yang harus ditagih oleh Kabupaten Indramayu kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebanyak Rp. 1.666.496.168,00 sebagai hak bagi hasil untuk Kabupaten Indramayu dari perolehan setoran retribusi pelelangan ikan tahun 2009. Dari informasi tersebut, tampaknya pihak Pemerintah Propinsi Jawa Barat belum bisa mengadaptasikan dirinya terhadap peraturan yang baru. Ketika penulis konfirmasi dan bertanya kepada petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat yang menangani retribusi pelelangan ikan, diperoleh penjelasan bahwa sejumlah dana tersebut benar adanya masih tersisa di propinsi, namun belum bisa dianggarkan untuk dikembalikan sebagai hak Kabupaten Indramayu, karena harus mendapat persetujuan dari DPRD Propinsi Jawa Barat dulu. Dan hingga kini pihak DPPKAD Kabupaten Indramayu masih terus berusaha menagihnya. Melihat permasalahan tersebut, efektivitas pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan masih belum tercapai.

e. Pengembangan

Uraian aspek kajian kelima menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : Kriteria ini untuk mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya agar bisa berkembang dan hidup terus dalam jangka waktu panjang. Usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manajerial dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal. Tetapi akhir-akhir ini cara pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis. Penulis meneliti aspek kajian pengembangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan. Beberapa aspek harus dilihat bahwa pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan sangat dipengaruhi oleh aktivitas pelelangan ikan di TPI. Sedangkan aktifitas pelelangan ikan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan manajerial pengelolaan TPI dan produksi ikan tangkapan yang dilelang di TPI. Produksi ikan hasil tangkapan dipengaruhi oleh ukuran kapal ikan dan jenis alat tangkap yang digunakannya. Dalam hal ini penulis menyoroti kemampuan SDM manager pengelola TPI dan kapal penangkap ikan beserta sarana alat tangkapnya.

Manager TPI yang ada di Indramayu umumnya dipilih oleh pengurus koperasi dari karyawan yang telah berpengalaman dan mempunyai kemampuan memadai. Seorang manager TPI dituntut mampu bekerja keras agar produksi nilai jual ikan yang dilelangkan di TPI dapat meningkat. Inovasi dan kreatifitasnya dibutuhkan agar aktifitas pelelangan ikan di TPI dapat berkembang. Oleh karena itu dia harus bisa menjaga hubungan baik antara nelayan, juragan, bakul dan karyawan TPI, sehingga semua komponen yang terlibat bisa bekerja dengan baik dan merasa puas.

Data dokumentasi dari laporan KUD Mina/KPL dan Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa dari 14 koperasi pengelola TPI diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Ada 8 koperasi pengelola TPI yang mengalami kenaikan produksi ikan yang dilelang di TPI yaitu : KUD Mina Jaya Tegalagung, KUD Ngupaya Mina Dadap, KUD Sri Mina Sari Galyem, KPL Mina Mulya Lombang, KUD Baita Mina Lestari Majakerta, KPL Mina Sumitra Karangsong, KUD Mina Bahari, dan KUD Karya Mina Ujunggebang
- b. Ada 4 koperasi pengelola TPI yang mengalami penurunan produksi ikan yang dilelang di TPI yaitu : KUD Mina Sejati Limbangan, KUD Karya Mina Muda Cangkring, KUD Misaya Mina Eretan Wetan, dan KUD Mina Sentosa Bugel.

- c. Ada 2 koperasi pengelola TPI yang sejak tahun 2009 tidak pernah menyelenggarakan aktivitas pelelangan ikan di TPI yaitu KPL Fajar Amil Laban dan KPUD Mina Sejahtera Brondong. Bahkan kedua koperasi tersebut saat ini tidak ada kepengurusannya.

Penulis meneliti bahwa pada 8 koperasi di atas (point a), pengurus koperasi manager dan karyawannya berusaha keras agar peningkatan produksi ikan yang dilelangkan di TPI sedapat mungkin mengalami kenaikan. Sedangkan pada 4 koperasi (point b) adanya kecenderungan persaingan yang ketat antara kebijakan koperasi menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dengan bakul langgan (tengkulak) yang cenderung menolak penjualan ikan secara lelang di TPI. Kemudian pada 2 koperasi (point c) terdapat bahwa pengurus koperasi tidak aktif, bahkan ada pengurus yang meninggal dunia. Akibatnya aktifitas pelelangan ikan tidak dapat dijalankan. Dari hasil kajian di atas bahwa 8 koperasi yang dapat meningkatkan produksi ikan yang dilelangkan di TPI dapat berkemabang lebih baik daripada 6 koperasi lainnya.

Dinas Perikanan dan Kelautan berupaya keras agar sub sektor perikanan tangkap dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tuntutan jaman dan kondisi lingkungan yang terjadi. Mengingat ketersediaan sumberdaya ikan di pantai sudah mengalami penurunan, sehingga produktivitas kapal ikan berukuran ≤ 10 GT sangat menurun, maka diperlukan terobosan pembuatan kapal berukuran besar (≥ 30 GT) dan dilengkapi alat tangkap yang ramah lingkungan dan produktif. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai program mendorong nelayan dan juragan agar memproduksi kapal berukuran besar dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan produktif agar perkembangan perikanan tangkap tidak mengalami penurunan. Yang pada gilirannya keberlangsungan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat terus berjalan sebagaimana mestinya, sehingga efektivitas pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan dapat dicapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat penambahan jumlah kapal berukuran > 30 GT sebanyak 12 unit di wilayah kerja KPL Mina Sumitra Karangsong. Dengan adanya penambahan kapal berukuran besar, maka produksi ikan di TPI Karangsong mengalami kenaikan sebesar 17,99% yaitu dari 14.126.363,00 kg pada tahun 2009 menjadi 16.525.820 kg pada tahun 2010. Dengan melihat hasil perkembangan tersebut, baik Dinas Perikanan dan Kelautan maupun KUD Mina/KPL beserta nelayan dan juragan terus berupaya untuk mengimplementasikan program kegiatan agar sub sektor perikanan tangkap di Indramayu dapat meningkat.

Kondisi sebaliknya terjadi pada TPI Dadap dan Eretan Wetan. Nelayan Dadap dan Eretan Wetan yang menggunakan alat tangkap purse seine, ada yang dijual karena produktivitas alat tangkap tersebut menurun, dan ada pula yang mendaratkan ikannya di daerah Labuan Propinsi Banten. Ikan hasil tangkapan dijual di TPI Labuan Banten, sehingga produksi ikan yang dilelang di TPI Dadap Kecamatan Juntinyuat dan TPI Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu mengalami penurunan. Hal ini menjadi catatan yang tidak baik dalam upaya implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dan efektivitas pengelolaan retribusi pelelangan ikan di Indramayu.

f. Keberlangsungan.

Uraian aspek kajian keenam menurut teori yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2001 : 31-32) bahwa : "Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya."

Kriteria ini untuk mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan perubahan lingkungan yang demikian pesat. Organisasi harus melakukan sistem manjerial secara visioner kedepan sehingga bisa menantisipasi hal-hal yang kemungkinan bakal terjadi. Organisasi juga harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya agar bisa hidup terus dalam jangka waktu panjang. Usaha untuk keberlangsungan atau hidup terus sejalan dengan upaya pengembangan diri dan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini perlu diperhatikan upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, sarana prasarana, permodalan usaha dan mekanisme pasar yang baik.

Penulis meneliti pada lembaga koperasi perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Pada lembaga koperasi perikanan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tidak dilakukan secara terencana dengan baik. Hasil wawancara dengan salah seorang pengurus koperasi perikanan mengatakan bahwa : Sebenarnya kami ingin lebih maju dan mempunyai karyawan yang berkualitas, tetapi untuk pembiayaannya kami belum punya. Bagi kami yang penting karyawan dapat menyenangi pekerjaannya sehingga bisa bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Oleh karena itu kami berharap agar Dinas Perikanan dan Kelautan dapat memfasilitasi untuk pembiayaan guna peningkatan kualitas SDM.

Setelah penulis mengamati dengan cermat diperoleh informasi bahwa tingkat kemauan para karyawan koperasi untuk meningkatkan kealitasnya masih rendah. Bagi mereka yang dipikirkan adalah bagaimana bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Pemikiran untuk meningkatkan kapasitas kemampuan diri masih rendah. Sebenarnya untuk karyawan yang bekerja di KPL Mina Sumitra tersedia dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup, karena potensi pengelolaan keuangan di koperasi tersebut sangat besar. Namun karena kebijakan pengurus koperasi yang kurang memperhatikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, maka upaya peningkatan kualitas SDM kurang mendapat perhatian serius. Mereka lebih banyak berharap dan mengandalkan adanya program kegiatan peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh pemerintah.

Data dokumentasi Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan adanya alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan. Pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten. Pada tahun 2011 untuk hal tersebut dianggarkan sebesar Rp. 364.876.000,00. Dan pada tahun 2012 direncanakan dianggarkan sebesar Rp. 1.025.000.000,00. Dari data tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu telah serius mengusahakan peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan. Hal ini dilakukan agar organisasi dan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan dapat berkembang dan maju mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan. Adapun mengenai program pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas program pengelolaan PAD dari sektor retribusi pelepasan ikan di Kabupaten Indramayu masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara raman *by landing* dengan raman hasil perhitungan statistik yaitu hanya 18,17% ikan yang dilelangkan di TPI. Masih sekitar 81,13% ikan hasil tangkapan laut yang belum dijual atau dilelangkan di TPI se-Kabupaten Indramayu. Penyebabnya adalah rasio jumlah ikan yang dilelangkan di TPI relatif masih sedikit, target retribusi masih rendah, penggalan potensi sumber-sumber retribusi belum maksimal, kontribusi perahu kecil sangat rendah, sedangkan jumlahnya sangat banyak dan alat tangkap yang digunakan kurang produktif.

Agar pengelolaan PAD sektor perikanan dan kelautan dapat berjalan secara efektif, perlu disarankan sebagai berikut: (a) Meningkatkan jumlah produksi dan kualitas ikan yang dilelangkan di TPI; (b) Target retribusi pelepasan ikan ditingkatkan menjadi Enam Milyard rupiah; (c) Kebijakan pengelolaan PAD retribusi pelepasan masih perlu untuk ditingkatkan lagi dengan menggali secara intensif sumber-sumber yang belum tergal; dan (d) Ketersediaan sumberdaya ikan di pantai ditingkatkan dengan upaya merehabilitasi habitatnya atau penggantian perahu kecil dengan perahu besar yang dilengkapi dengan sarana penangkapan ikan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, Ivancevich dan Donnelly. 2001. Organisasi: *Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 60 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pemungutan dan Penggunaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Indramayu.